



## PELATIHAN TATA KELOLA KEUANGAN DI MA MIFTAHUL HUDA

<sup>1\*</sup>Yudi Ruswandi, <sup>2</sup>Hoerudin, <sup>3</sup>Riri Sari Fajar, <sup>4</sup>Syifa Almas Ramdania

STAI Al Mas'udiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

[yudiruswandi@gmail.com](mailto:yudiruswandi@gmail.com)

### Abstrak

Kegiatan pelatihan tata kelola keuangan di MA Miftahul Huda bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan sekolah dalam mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pelatihan ini didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki sistem keuangan di lingkungan sekolah guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik dan memastikan penggunaan sumber daya secara optimal. Pelatihan ini melibatkan beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan melalui survei dan diskusi dengan staf keuangan dan pimpinan sekolah. Berdasarkan hasil identifikasi ini, materi pelatihan disusun mencakup pengelolaan anggaran, pembukuan, pelaporan keuangan, dan audit internal. Pelatihan tata kelola keuangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan di MA Miftahul Huda, sehingga dana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan sekolah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, diharapkan kualitas pendidikan di MA Miftahul Huda akan semakin meningkat dan sekolah dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya.

Kata Kunci: Keuangan, Sumber Daya Keuangan, Tata Kelola, Manajemen

### Abstract

The financial management training at MA Miftahul Huda aims to enhance the competencies of school financial managers in handling funds transparently, accountably, and efficiently. This training is driven by the need to improve the financial system within the school environment to support better educational outcomes and ensure optimal resource utilization. The training involves several stages: planning, implementation, and evaluation. The planning stage includes identifying training needs through surveys and discussions with financial staff and school leadership. Based on these needs, the training material is developed to cover budget management, bookkeeping, financial reporting, and internal auditing. This financial management training is expected to positively contribute to the financial management at MA Miftahul Huda, enabling optimal use of funds to support educational activities and school development. With improved financial governance, it is hoped that the quality of education at MA Miftahul Huda will increase, leading to better performance in resource management.

Keywords: Finance, Financial Resources, Governance, Management

### PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan yang baik di sekolah merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga esensial untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk

meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, pentingnya tata kelola keuangan di sekolah tidak dapat diabaikan, mengingat peran strategisnya dalam mendukung segala aspek operasional dan pengembangan institusi pendidikan.

Pertama, tata kelola keuangan yang baik membantu sekolah dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat. Melalui perencanaan keuangan yang matang, sekolah dapat menentukan prioritas dalam pengeluaran, memastikan bahwa dana yang ada dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak terbesar terhadap proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Hal ini mencakup pengadaan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan bahan ajar yang berkualitas.

Kedua, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah menjadi aspek yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, sekolah dapat memberikan laporan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran. Kepercayaan yang terbangun dari akuntabilitas ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dukungan finansial dan moral dari berbagai pihak.

Ketiga, efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah berkontribusi langsung pada peningkatan efektivitas pembelajaran. Dana yang dikelola dengan efisien memungkinkan sekolah untuk meminimalkan pemborosan dan mengarahkan lebih banyak sumber daya ke area yang benar-benar membutuhkan. Efisiensi ini tidak hanya mencakup aspek pengeluaran, tetapi juga dalam hal penerimaan, seperti pengelolaan dana bantuan, donasi, dan sumber pendapatan lainnya secara bijaksana.

Selain itu, tata kelola keuangan yang baik juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencetak generasi yang berkualitas dan berintegritas. Sekolah yang mampu mengelola keuangannya dengan baik memberikan contoh yang positif bagi siswa, mengajarkan nilai-nilai transparansi, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Ini penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, implementasi tata kelola keuangan yang baik di sekolah merupakan suatu keharusan yang mendesak. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, tetapi juga untuk memastikan bahwa sekolah dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Upaya peningkatan tata kelola keuangan ini harus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan adopsi teknologi yang mendukung. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, diharapkan tata kelola keuangan di sekolah dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai visi dan misi pendidikan yang diidamkan.

Dalam konteks pembangunan sebuah negara, pembangunan terhadap sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting. (Eka, n.d.) Dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, negara akan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Namun jika pembangunan terhadap sumber daya manusia itu tersendat, akan berpengaruh sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan negara.

Namun untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, perlu strategi jitu dan waktu yang cukup panjang. Selain itu, perlu juga mendapat dukungan sumber daya lain yang harus berjalan beriringan dengan proses pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya lain itu

seperti sarana dan prasarana/infrastruktur. Sebagaimana dikemukakan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2004-sekarang) dalam APBN KITA edisi Maret 2019, bahwa berdasarkan pengalamannya bekerja di Bank Dunia, ia melihat setidaknya ada tiga hal yang dimiliki oleh negara maju, yaitu: institusi, *human capital*, dan infrastruktur. (“3 Syarat Agar Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi | merdeka.com,” n.d.)

Pentingnya negara memiliki institusi-institusi yang bersih dan berintegritas. Agar tingkat integritasnya tinggi tentu harus diisi oleh sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Bangsa Indonesia yang penuh dedikasi terhadap pekerjaannya, ikhlas membaktikan diri dan ilmunya demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga dalam pandangan Menteri Keuangan Republik Indonesia, investasi yang sangat penting pertama kali adalah investasi terhadap manusia atau disebut dengan istilah *human capital*.

Arah pembangunan yang kedua setelah investasi pada pengembangan sumber daya manusia, adalah membangun infrastruktur yang produktif dan bisa menunjang proses pengembangan sumber daya manusia. Kedua hal inilah menjadi konsentrasi anggaran negara sampai saat ini. (“3 Syarat Agar Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi | merdeka.com,” n.d.)

Mengenai pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana amanah konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. (“UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [JDIH BPK RI],” n.d.) Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, pada tahun 2009, anggaran pendidikan sudah mencapai 207 triliun rupiah atau sekitar 20,8% dari APBN. Setiap tahun, anggaran pendidikan selalu mengalami peningkatan. Sampai di tahun 2018 anggaran pendidikan mencapai 444,1 triliun. (Keuangan, 2018)

Anggaran yang sangat besar tersebut diharapkan dapat terus memberikan pelayanan pendidikan yang merata namun berkualitas bagi bangsa Indonesia. Pelayanan pendidikan itu diarahkan mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Program Indonesia pintar sebanyak 19,6 juta jiwa;
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 56 juta jiwa;
3. Beasiswa bidik misi untuk 401,5 ribu mahasiswa;
4. Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas sebanyak 61,2 ribu;
5. Tunjangan profesi guru non PNS sebanyak 435,9 ribu guru, PNS sebanyak 257,2 ribu guru, dan PNS Daerah sebanyak 1,2 juta guru. (Keuangan, 2018)

Besaran anggaran yang meningkat untuk setiap tahunnya, namun masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan. Karena APBN masih terbatas dan belum mampu dibebankan sepenuhnya. Namun, kita mesti juga menyadari bahwa alokasi dan realisasi anggaran pendidikan setiap tahun yang meningkat, menunjukkan komitmen Pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Maka untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, diperlukan bantuan melalui kerjasama seluruh pihak, baik masyarakat maupun *stakeholders* lainnya yang bisa membantu memenuhi pembiayaan pendidikan. Berdasarkan hasil analisa penyusun di lapangan, hal ini

merupakan pekerjaan yang cukup berat dan kompleks. Hal yang paling sulit dirasakan adalah bagaimana memberikan kesadaran pada semua pihak tentang memaksimalkan peran masing-masing sebagaimana diharapkan dan diatur melalui peraturan yang berlaku.

Tantangan saat ini adalah memberikan kesadaran kepada sekolah terutama masyarakat untuk mampu bersama-sama mewujudkan generasi bangsa yang unggul. Kerjasama ini sangat penting, karena dapat meningkatkan partisipasi semua pihak untuk membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju melalui pendidikan.

Kendala-kendala lain yang juga penting yaitu masih adanya persoalan alur birokrasi dan administrasi mulai dari pengajuan bantuan, penggunaan anggaran, sampai pada pelaporan penggunaan anggaran, terutama yang bersumber dari APBN dan APBD. Sedangkan dalam tahap perencanaan, masih adanya satuan pendidikan yang merasa kebingungan tentang bagaimana mekanisme penyusunan dan pembuatan RKAS.

Mengingat beberapa permasalahan di atas, maka sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana tata kelola pengembangan sumber daya keuangan di sekolah. Dengan harapan dapat memberikan kejelasan mengenai aturan pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **METODE**

Solusi yang diambil dari permasalahan dalam Pelatihan tata kelola keuangan di MA Miftahul Huda adalah:

- a. Identifikasi hambatan-hambatan sumber daya sekolah dalam mengelola keuangan;
- b. Membuat sistem tata kelola keuangan sederhana yang aplikatif dan akuntabel

### **A. Perencanaan**

Mekanisme pengelolaan keuangan disesuaikan mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Satuan pendidikan (RKS) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dilaksanakan melalui empat langkah: pertama, analisis konteks; kedua, hasil analisis sebagai bahan penentuan strategi perencanaan; ketiga, strategi perencanaan diwujudkan melalui penyusunan visi dan misi; keempat, dituangkan dalam RKS.

### **B. Pelaksanaan**

Setelah RKS tersusun dan telah melalui beberapa revisi, selanjutnya dijadikan sebagai rujukan dalam tahap implementasi sesuai dengan jadwal dan biaya yang dianggarkan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam tahap pelaksanaan, perlu didukung oleh semua pihak (warga sekolah), melalui komitmen bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

### **C. Pelaporan**

Proses pelaporan terdiri dari: Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler, Pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, Laporan asset, Laporan ke Dinas Pendidikan, dan Laporan Daring ke Laman BOS Reguler.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pelatihan diikuti oleh Kepala Sekolah, sebagian wakil sekolah (termasuk kepala tata usaha dan bendahara), dan sebagian guru yang hadir. Langkah awal, pihak sekolah menyampaikan keluhan-keluhan tentang hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan selama ini. Dari pemaparan pihak sekolah tersebut, diketahui bahwa sekolah belum memiliki sistem baku dalam mengelola keuangan.

Selama ini, sekolah cukup melaksanakan pencatatan keuangan (arus kas) secara manual saja. RKS belum dijadikan sebagai rujukan/pedoman dalam merencanakan dan mengalokasikan keuangan untuk biaya operasional. Namun masih tergantung dari pertimbangan skala prioritas kepala sekolah saja.

Dengan demikian, sekolah kurang begitu menghiraukan tentang adanya sistem pengelolaan keuangan. Berkaitan dengan dana bantuan pemerintah berupa BOS, pihak sekolah memanfaatkan koordinasi dengan pihak sekolah lain saja dalam melaporkan penggunaan anggaran.

### **A. Pengertian Manajemen Keuangan**

Terdapat dua konsep dalam tinjauan tentang definisi manajemen keuangan, yaitu konsep manajemen dan keuangan. Beberapa pakar memberikan pengertian tentang manajemen, diantaranya menurut Ismaya, manajemen itu adalah “Suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi”.(Ismaya, 2015) Williams juga menggarisbawahi manajemen itu mencakup kegiatan pembuatan perencanaan dan pembuatan keputusan. Lebih detailnya ia mengungkapkan bahwa “*management involves making plans and decisions about the future needs of the business; management is about making cost-effective use of resources through efficient organization and control; and management is about getting the best of people to achieve objectives*”.(Gunawan, 2017)

### **B. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah**

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 dinyatakan bahwa dana pendidikan itu harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip keadilan dilaksanakan dengan kesesuaian alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah. Setiap jenjang pendidikan dari mulai yang paling dasar di tingkat PAUD sampai dengan yang paling tinggi pada jenjang perguruan tinggi, tentu akan memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda. Sehingga dalam konteks keadilan, tentu bukan dalam arti menyamakan anggaran tetapi lebih kepada proporsi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu.

### **C. Sumber Dana Pendidikan**

Sumber dana pendidikan diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa dana pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga dipertegas kembali dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 3.

Penentuan sumber pendidikan tersebut, didasari oleh tiga prinsip, yaitu: keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa prinsip keadilan itu berarti bahwa “besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing”. Prinsip kecukupan disebutkan dalam ayat (3) yaitu “pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan”. Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan tentang prinsip keberlanjutan, bahwa “pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan”. (“UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [JDIH BPK RI],” n.d.)

Sumber pendanaan dari Pemerintah dapat berupa: hibah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), membayar gaji guru, upaya membantu sekolah dengan mengadakan penggalangan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan, pendanaan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah. (Gunawan, 2017) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program bantuan pendidikan lain untuk setiap sekolah, salah satunya berupa program hibah atau program lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **D. Perencanaan Tata Kelola Keuangan**

Pengelolaan keuangan di MA Miftahul Huda dimulai dengan menyusun peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan. Sekolah harus memiliki landasan yang jelas dan tetap untuk menjamin pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan pos anggaran. Pos anggaran yang dimaksud, juga tergantung dari sumber dana, dari mana dana itu berasal, dan bagaimana SPJ nya. Oleh karena itu perencanaan dimulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Satuan pendidikan (RKS) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

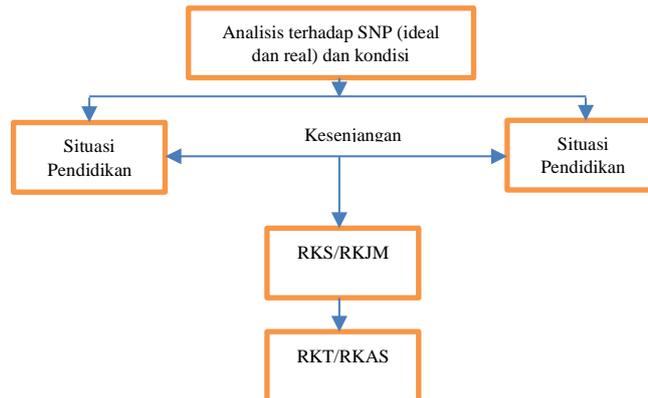
Adapun langkah-langkah penyusunan RKS secara sistematis mengikuti alur sebagai berikut:

1. Menganalisis konteks terhadap delapan standar nasional pendidikan dan satuan pendidikan serta analisis terhadap kondisi lingkungan satuan pendidikan. Analisis terhadap delapan standar pendidikan bertujuan untuk memetakan antara kondisi ideal berdasarkan standar nasional pendidikan dengan kondisi real di satuan pendidikan tersebut. Proses analisis yang baik, akan menghasilkan akurasi data yang tinggi. Data tersebut merupakan data yang akan dijadikan sebagai input untuk membuat RKS. Selain itu, analisis juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan untuk mengidentifikasi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dapat berimplikasi kepada satuan pendidikan.
2. Hasil analisis terhadap kondisi satuan pendidikan dan lingkungan dijadikan sebagai bahan untuk menentukan strategi perencanaan.
3. Strategi perencanaan diwujudkan melalui penyusunan visi, misi, sasaran, dan strategi pengembangan yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan. Unsur-unsur tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam RKS.

4. RKS terwujud dalam RKJM dan RKT/RKAS. RKJM disusun untuk jangka waktu empat tahun. Dimana isinya adalah rincian kegiatan untuk tahun pertama sampai tahun keempat. RKT yang merupakan bagian dari RKJM dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun pendanaan kegiatannya yang disebut dengan RKAS.

Untuk memperjelas mekanisme perencanaan keuangan tersebut, penyusun sajikan dalam skema sebagai berikut:

**Skema 1 .Mekanisme Perencanaan Keuangan di MA Miftahul Huda**



Penyusunan RKS secara keseluruhan berada di bawah kendali kepala sekolah. Kepala sekolah membuat tim khusus perencanaan RKS yang beranggotakan komite sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan guru. Tugas dari tim ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dan mengolah hasil analisis konteks.
2. Mengidentifikasi rencana tindak lanjut.
3. Menentukan skala prioritas.
4. Menentukan rencana kegiatan.
5. Menentukan rencana pembiayaan.
6. Menentukan target capaian
7. Menjabarkan peran dan fungsi personil yang terlibat.
8. Menentukan waktu pelaksanaan.
9. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar.

Hasil analisis konteks yang diperoleh pada penyusunan RKJM 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Sekolah yang berada paling barat kota Bandung yang berbatasan dengan wilayah kota Cimahi.
2. Status kepemilikan tanah masih dalam sengketa dengan pemilik sebenarnya (perorangan).
3. Lingkungan sekolah di pinggir jalan raya provinsi, dan dekat dengan bibir sungai yang mengakibatkan struktur tanah labil dan mempengaruhi terhadap bangunan sekolah.
4. Keberagaman status orang tua siswa, pendidikan, penghasilan, maupun kepada siswa.
5. Tingkat ekonomi orang tua siswa yang amat sangat beragam.
6. Luas tanah dan bangunan yang tidak mungkin untuk perluasan bangunan dan tempat aktifitas para siswa di luar kelas

Berdasarkan hasil tinjauan tentang hasil analisis konteks terutama aspek lingkungan di *MA Miftahul Huda*, penyusun berkesimpulan bahwa permasalahan yang menjadi konsentrasi sekolah sampai tahun 2022 adalah permasalahan mengenai sarana prasarana. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk sarana dan prasana pada tahun pelajaran 2014/2015 sebesar Rp. 1.214.055.880 (satu milyar dua ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Alokasi anggaran tersebut merupakan alokasi anggaran yang paling besar yaitu sebesar 32% dari total pengeluaran sekolah.

Sampai di RKJM untuk tahun 2018-2022, hasil analisis konteks menunjukkan bahwa persoalan sarana dan prasarana tetap menjadi prioritas utama konsentrasi anggaran. Namun, karena keterbatasan data yang diberikan oleh pihak sekolah, untuk tahun 2018/2019 tidak ada angka pasti sehingga belum dapat dipastikan apakah alokasi anggarannya memiliki persentasi yang sama dengan tahun pelajaran 2014/2015 atau tidak.

Setelah mencermati RKJM 2018-2022 *MA Miftahul Huda*, terdapat penjelasan yang bertolak belakang antara ketersediaan anggaran dengan alternatif pemecahan persoalan yang dihadapi. Di bagian hasil analisis SWOT, ketersediaan dana dikatakan cukup, memadai, dan tersedia, namun pada aspek pemecahan masalah justru ditentukan tiga hal yang tidak mencerminkan kecukupan anggaran. Ketiga hal itu adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menggalang dana dari masyarakat yang tidak mengikat.
2. Mengajukan proposal terkait dengan pemenuhan sarana prasarana ke direktorat dasar dan menengah Kemendikbud RI di Jakarta.
3. Penggalangan dana melalui proyeksi CSR (*MA Miftahul Huda*, 2018:20)

Berdasarkan penuturan kepala sekolah, bahwa saat ini di SMAN 13 komite sekolah dalam menjalankan fungsinya masih terbatas pada mengajak orang tua untuk membantu keuangan sekolah dalam menjalankan program setiap tahun, terutama program untuk pengembangan sarana dan prasarana. Dari data mengenai langkah-langkah strategis dan hasil wawancara kepada kepala sekolah, penyusun berkeyakinan bahwa persoalan kecukupan anggaran masih sangat besar dan belum dalam kondisi memadai.

#### **E. Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan**

Setelah RKS tersusun dan telah melalui beberapa revisi, selanjutnya dijadikan sebagai rujukan dalam tahap implementasi sesuai dengan jadwal dan biaya yang dianggarkan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam tahap pelaksanaan, perlu didukung oleh semua pihak (warga sekolah), melalui komitmen bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Di samping itu, warga sekolah juga harus mematuhi segala ketentuan dan kewajiban yang berlaku dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kepala sekolah bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan kegiatan yang sudah direncanakan, dapat berjalan sesuai dengan waktu dan capaian yang ditentukan.

#### **F. Pelaporan Tata Kelola Keuangan**

Pembukuan dan laporan keuangan sekolah, salah satunya mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dalam

Lampiran bab V mengenai Pertanggungjawaban Keuangan, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah harus membuat pembukuan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Pembukuan dan dokumen pendukung tersebut terdiri dari: RKAS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti Pengeluaran.
  - a. RKAS. Ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan ketua yayasan (untuk swasta). RKAS dibuat satu kali dalam setahun, namun dapat direvisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalamnya juga bisa dilengkapi dengan rencana penggunaan dana yang lebih rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan sesuai dengan sumber dana yang diterima.
  - b. BKU. Dalam BKU mencakup semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun nontunai. Diisi tiap transaksi, di mana transaksi tersebut juga harus dicatat dalam buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.
  - c. Buku Pembantu Kas. Berisi catatan setiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
  - d. Buku Pembantu Bank. Berisi catatan tiap transaksi melalui bank dalam bentuk cek, giro, atau tunai (ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah).
  - e. Buku Pembantu Pajak. Berisi catatan setiap transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyeteroran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
  - f. Opname Kas dan BAP Kas. Tiap kali menjelang penutupan BKU, kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di Sekolah dalam bentuk kas tunai maupun kas yang ada di bank atau rekening Sekolah. Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala Sekolah dan bendahara menandatangani berita acara pemeriksaan kas.
  - g. Bukti Pengeluaran.
    - 1) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
    - 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
    - 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
    - 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
    - 5) Tiap bukti pembayaran harus disetujui kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara.
    - 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Untuk proses pelaporan terdiri dari:

- a. Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana.
- b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Bos Reguler.
- c. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- d. Laporan Aset.

- e. Laporan ke Dinas Pendidikan.
- f. Laporan Daring ke Laman BOS Reguler

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelatihan, sekolah akan mulai membangun sistem pengelolaan keuangan muali dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andiawati, ETTY (2017). *“Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah”*. Jurnal FKIP
- Barlian, U.C. (2016). *Manajemen Strategik: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Khalifa Insan Cendekia Press
- Gaol, J.L. (2015). *Kendalaan dan Sukses Sekretaris Perusahaan dan Organisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Gunawan, I dan Benty, D.D.N. (2017). *Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Ismaya. (2015). *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Katresna. 2011. *Pengelolaan Keuangan Sekolah*. [online]. Tersedia: <https://katresna72.files.wordpress.com/2011/06/3-pengelolaan-kuangan-sekolah.pdf>
- KBBI. 2019. *Keuangan*. [online]. Tersedia: <https://kbbi.kata.web.id/keuangan/>
- Kemenag RI. 2011. *Permendikbud Ri Nomor 16 Tahun 2011*. [online]. Tersedia: [http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud\\_60\\_11.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_60_11.pdf)
- Kemenristekdikti. 2019. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 2019*. [online]. Tersedia: <https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:04.11jdih&ref=3ed11eva7kw92d90ga66bsel0i61490x5p6ce8d6a1513df1f5555bdqc29e3adzffebcc6e7a15e3aa6h5956ffmadteae56ud0d5dj0a1ffb1bb3299o0d3ry1bd94bc7e&task=2036>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia. (2013). *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: LPPKS
- Sa’ud, U.S dan Makmun, A.S. (2014). *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- TKPLB. 2016. *Modul Kepala Sekolah*. [online]. Tersedia: [http://file.tkplb.net/GP\\_2016/\\_KSP/KS\\_PEMBELAJAR/03.%20CETAK\\_PESERTA/01\\_KSP\\_MODUL%20\\_2016\\_09\\_01/01\\_KSP\\_M04\\_2016\\_09\\_01.pdf](http://file.tkplb.net/GP_2016/_KSP/KS_PEMBELAJAR/03.%20CETAK_PESERTA/01_KSP_MODUL%20_2016_09_01/01_KSP_M04_2016_09_01.pdf)
- UIN Malang. 2019. *Manajemen Keuangan Menurut Al Qur’an*. [online]. Tersedia: <http://etheses.uin-malang.ac.id/12161/>
- UNY. 2015. *Modul Penyusunan RKAS*. [online]. Tersedia: [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132313278/pengabdian/MODUL+PENYUSUNAN+RKAS\\_RAHMANIA.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132313278/pengabdian/MODUL+PENYUSUNAN+RKAS_RAHMANIA.pdf)
- Zonkeu. 2019. [online]. Tersedia: <https://www.zonkeu.com/pengertian-keuangan-menurut-para-ahli/>